

# **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DISTRIBUSI DAN KUOTA FILM NASIONAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSIBITOR DAN PRODUSEN FILM NASIONAL**

**Nugraha Artha Putra  
1587055**

## **ABSTRAK**

Di dalam dunia perfilman Indonesia, masih sering terjadi permasalahan terkait dengan distribusi karya film. Penayangan film di bioskop, sepenuhnya ditentukan oleh pelaku usaha pertunjukan film (bioskop), dengan mempertimbangkan aspek bisnis saja. Hal ini berpotensi merugikan pihak produsen film lokal. Di Indonesia sudah diberlakukan aturan yang mengatur sistem kuota tayang film, namun aturan tersebut belum mencantumkan sanksi secara tegas bagi pelanggarnya. Dengan demikian, penulis akan mengkaji bagaimana tanggung jawab negara dalam mendorong pertumbuhan film lokal dan melindungi para pihak yang terlibat dalam industri perfilman.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Dari hasil penelitian ini, pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya dalam mendorong pertumbuhan film lokal dengan membuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019. Namun peraturan tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap produsen film lokal karena tidak terdapat sanksi di dalam aturan tersebut terkait pelanggaran kuota tayang oleh eksibitor, serta belum ada adanya lembaga yang dibentuk oleh negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak tegas apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang ada.

**Kata Kunci: Distribusi, Kuota, Film, Perlindungan Hukum**

**JURIDICAL ANALYSIS OF NATIONAL FILM DISTRIBUTION AND QUOTA  
REGULATION AND LEGAL PROTECTION FOR NATINONAL FILM EXHIBITOR  
AND PRODUCERS**

**NUGRAHA ARTHA PUTRA**

**1587055**

**ABSTRACT**

In the Indonesian film industry, problems still often occurred in regards to the distribution of film works. Screening of films in theaters, is entirely determined by film show business actors (cinema), taking into account only the business aspects. This has the potential to harm local film producers. In Indonesia, a rule governing the film show quota system has been enacted, but the rule does not yet include strict sanctions for violators. Thus, the author will examine how the state is responsible for encouraging the growth of local films and protecting those involved in the film industry.

The research method used in this study is the normative juridical approach. Normative juridical research methods is focused on studying the application of the rules or norms in positive law.

Result showed that the government has fulfilled its responsibility in encouraging the growth of local films by making Act Number 33 of 2009, and Permendikbud Number 34 of 2019. However, the regulation has not provided maximum legal protection for local film producers because there are no sanctions in the regulation is related to violations of the broadcasts by exhibitors, and there is no institution established by the state that has the authority to supervise and take firm action if there are violations of existing written regulations.

**Keyword: Distribution, Quota, Film, Legal Protection**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM HUKUM PERFILMAN INDONESIA</b>	
A. Pokok-Pokok Pengaturan Perfilman Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.....	21
B. Lembaga-Lembaga Yang Terkait Dalam Pengelolaan Perfilman Indonesia.....	32
C. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Industri Perfilman.....	37

**BAB III PERLINDUNGAN HAK PRODUSEN FILM DAN EKSIBITOR FILM  
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

- A. Aspek Hukum Perjanjian Dalam Kegiatan Distribusi Film... 42
- B. Hubungan Hukum Antar Pihak Dalam Kegiatan Distribusi  
Film..... 51
- C. Pengaturan Hak Produsen Dan Eksibitor Dalam Peraturan Perundang-  
Undangan Di Indonesia..... 56

**BAB IV ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA  
TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PRODUSEN FILM DAN EKSIBITOR  
FILM DALAM TATA KELOLA PERFILMAN DI INDONESIA.**

- A. Tanggung Jawab Negara dalam Mendorong Pertumbuhan Film Lokal  
Dihubungkan dengan Pengaturan Sistem Kuota Tayang Menurut Perundang-  
Undangan di Indonesia.....64
- B. Perlindungan Hukum Bagi Produsen Film Nasional Dan Eksibitor  
Dihubungkan Dengan Pengaturan Sistem Distribusi Dan Penayangan Film  
Di Indonesia..... 78

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

- A. Simpulan ..... 96
- B. Saran ..... 100

**Daftar Pustaka ..... 102**